



SALINAN

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 263 TAHUN 2014

TENTANG

KLASIFIKASI DAN PENETAPAN BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK  
SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa penentuan klasifikasi dan besarnya Nilai Jual Objek Pajak sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 200 Tahun 2012 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, sudah tidak memadai untuk digunakan sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan bagi sektor Perdesaan dan Perkotaan;
  - b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan bagi Wajib Pajak, dan stabilitas dalam penentuan Nilai Jual Objek Pajak, perlu dilakukan penyesuaian klasifikasi dan penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Klasifikasi dan Penetapan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak;
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan :** PERATURAN GUBERNUR TENTANG KLASIFIKASI DAN PENETAPAN BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Dinas Pelayanan Pajak yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pelayanan Pajak Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Kepala Dinas Pelayanan Pajak yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disebut PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan pada sektor perdesaan dan perkotaan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

7. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
9. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti.
10. Nilai jual bumi per meter persegi adalah nilai bumi per meter persegi yang diperoleh melalui harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, nilai perolehan baru, atau nilai jual pengganti.
11. Nilai jual bangunan per meter persegi adalah nilai bangunan per meter persegi yang diperoleh melalui nilai perolehan baru yang dikurangi dengan penyusutan.
12. Objek Pajak Sektor Perdesaan dan Sektor Perkotaan adalah objek PBB-P2 yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali Objek Pajak Sektor Perkebunan, Objek Pajak Sektor Perhutanan dan Objek Pajak Sektor Pertambangan.
13. Klasifikasi adalah pengelompokan nilai jual Bumi atau nilai jual Bangunan yang digunakan sebagai pedoman penetapan NJOP Bumi dan NJOP Bangunan.

## BAB II

### KLASIFIKASI NJOP BUMI DAN NJOP BANGUNAN

#### Pasal 2

- (1) Klasifikasi dan besarnya NJOP bumi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur.
- (2) Klasifikasi dan besarnya NJOP bangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur.
- (3) Dalam hal nilai jual bumi lebih besar dari nilai jual tertinggi dari Klasifikasi NJOP Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka nilai jual bumi tersebut ditetapkan sebagai NJOP Bumi.
- (4) Dalam hal nilai jual bangunan lebih besar dari nilai jual tertinggi dari Klasifikasi NJOP Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka nilai jual Bangunan tersebut ditetapkan sebagai NJOP Bangunan.

## BAB III

### PENETAPAN NJOP BUMI DAN NJOP BANGUNAN

#### Pasal 3

- (1) NJOP digunakan sebagai dasar pengenaan PBB-P2.
- (2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 1 (satu) tahun.

- (3) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur atas usul Kepala Dinas.
- (4) Dalam hal terdapat perubahan nilai jual bumi per meter persegi dan/atau nilai jual bangunan per meter persegi yang mengakibatkan perubahan klasifikasi dan besarnya NJOP dalam Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas atas nama Gubernur melakukan perubahan mengenai penetapan NJOP sebagai dasar pengenaan PBB-P2 dengan menerbitkan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 4

Penggunaan NJOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) hanya untuk kepentingan perpajakan.

Pasal 5

Ketentuan mengenai tata cara pengusulan penetapan besarnya NJOP kepada Gubernur diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 200 Tahun 2012 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2014 NOMOR 61052

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,





Lampiran I : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor  
Tanggal

KLASIFIKASI NILAI JUAL BUMI DAN PENETAPAN  
NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI

KELAS	PENGELOMPOKAN NILAI JUAL BUMI (RP/M2)	NILAI JUAL OBJEK PAJAK (RP/M2)
001	> 149.855.000 s.d. 152.185.000	151.020.000
002	> 147.550.000 s.d. 149.855.000	148.703.000
003	> 145.270.000 s.d. 147.550.000	146.410.000
004	> 143.015.000 s.d. 145.270.000	144.143.000
005	> 140.785.000 s.d. 143.015.000	141.900.000
006	> 138.580.000 s.d. 140.785.000	139.683.000
007	> 136.400.000 s.d. 138.580.000	137.490.000
008	> 134.245.000 s.d. 136.400.000	135.323.000
009	> 132.115.000 s.d. 134.245.000	133.180.000
010	> 130.010.000 s.d. 132.115.000	131.063.000
011	> 127.930.000 s.d. 130.010.000	128.970.000
012	> 125.875.000 s.d. 127.930.000	126.903.000
013	> 123.845.000 s.d. 125.875.000	124.860.000
014	> 121.840.000 s.d. 123.845.000	122.843.000
015	> 119.860.000 s.d. 121.840.000	120.850.000
016	> 117.905.000 s.d. 119.860.000	118.883.000
017	> 115.975.000 s.d. 117.905.000	116.940.000
018	> 114.070.000 s.d. 115.975.000	115.023.000
019	> 112.190.000 s.d. 114.070.000	113.130.000
020	> 110.335.000 s.d. 112.190.000	111.263.000
021	> 108.505.000 s.d. 110.335.000	109.420.000
022	> 106.700.000 s.d. 108.505.000	107.603.000
023	> 104.920.000 s.d. 106.700.000	105.810.000
024	> 103.165.000 s.d. 104.920.000	104.043.000

KELAS	PENGELOMPOKAN NILAI JUAL BUMI (RP/M2)	NILAI JUAL OBJEK PAJAK (RP/M2)
025	> 101.435.000 s.d. 103.165.000	102.300.000
026	> 99.730.000 s.d. 101.435.000	100.583.000
027	> 98.050.000 s.d. 99.730.000	98.890.000
028	> 96.395.000 s.d. 98.050.000	97.223.000
029	> 94.765.000 s.d. 96.395.000	95.580.000
030	> 93.160.000 s.d. 94.765.000	93.963.000
031	> 91.580.000 s.d. 93.160.000	92.370.000
032	> 90.025.000 s.d. 91.580.000	90.803.000
033	> 88.495.000 s.d. 90.025.000	89.260.000
034	> 86.990.000 s.d. 88.495.000	87.743.000
035	> 85.510.000 s.d. 86.990.000	86.250.000
036	> 84.055.000 s.d. 85.510.000	84.783.000
037	> 82.625.000 s.d. 84.055.000	83.340.000
038	> 81.220.000 s.d. 82.625.000	81.923.000
039	> 79.840.000 s.d. 81.220.000	80.530.000
040	> 78.485.000 s.d. 79.840.000	79.163.000
041	> 77.155.000 s.d. 78.485.000	77.820.000
042	> 75.850.000 s.d. 77.155.000	76.503.000
043	> 74.570.000 s.d. 75.850.000	75.210.000
044	> 73.315.000 s.d. 74.570.000	73.943.000
045	> 72.085.000 s.d. 73.315.000	72.700.000
046	> 70.880.000 s.d. 72.085.000	71.483.000
047	> 69.700.000 s.d. 70.880.000	70.290.000
048	> 68.545.000 s.d. 69.700.000	69.123.000
049	> 67.390.000 s.d. 68.545.000	68.545.000
050	> 66.255.000 s.d. 67.390.000	66.823.000
051	> 65.120.000 s.d. 66.255.000	66.255.000
052	> 64.005.000 s.d. 65.120.000	64.563.000
053	> 62.890.000 s.d. 64.005.000	64.000.000
054	> 61.795.000 s.d. 62.890.000	62.343.000

KELAS	PENGELOMPOKAN NILAI JUAL BUMI (RP/M2)	NILAI JUAL OBJEK PAJAK (RP/M2)
055	> 60.700.000 s.d. 61.795.000	61.795.000
056	> 59.625.000 s.d. 60.700.000	60.163.000
057	> 58.550.000 s.d. 59.625.000	59.625.000
058	> 57.495.000 s.d. 58.550.000	58.023.000
059	> 56.440.000 s.d. 57.495.000	57.495.000
060	> 55.405.000 s.d. 56.440.000	55.923.000
061	> 54.370.000 s.d. 55.405.000	55.405.000
062	> 53.355.000 s.d. 54.370.000	53.863.000
063	> 52.340.000 s.d. 53.355.000	53.355.000
064	> 51.345.000 s.d. 52.340.000	51.843.000
065	> 50.350.000 s.d. 51.345.000	51.345.000
066	> 49.375.000 s.d. 50.350.000	49.853.000
067	> 48.400.000 s.d. 49.375.000	49.375.000
068	> 47.445.000 s.d. 48.400.000	47.923.000
069	> 46.490.000 s.d. 47.445.000	47.445.000
070	> 45.555.000 s.d. 46.490.000	46.023.000
071	> 44.620.000 s.d. 45.555.000	45.555.000
072	> 43.705.000 s.d. 44.620.000	44.163.000
073	> 42.790.000 s.d. 43.705.000	43.705.000
074	> 41.895.000 s.d. 42.790.000	42.343.000
075	> 41.000.000 s.d. 41.895.000	41.895.000
076	> 40.125.000 s.d. 41.000.000	40.563.000
077	> 39.250.000 s.d. 40.125.000	40.125.000
078	> 38.395.000 s.d. 39.250.000	38.823.000
079	> 37.540.000 s.d. 38.395.000	38.395.000
080	> 36.705.000 s.d. 37.540.000	37.123.000
081	> 35.870.000 s.d. 36.705.000	36.705.000
082	> 35.055.000 s.d. 35.870.000	35.463.000
083	> 34.240.000 s.d. 35.055.000	35.055.000
084	> 33.445.000 s.d. 34.240.000	33.843.000

KELAS	PENGELOMPOKAN NILAI JUAL BUMI (RP/M2)	NILAI JUAL OBJEK PAJAK (RP/M2)
085	> 32.650.000 s.d. 33.445.000	33.445.000
086	> 31.875.000 s.d. 32.650.000	32.263.000
087	> 31.100.000 s.d. 31.875.000	31.875.000
088	> 30.345.000 s.d. 31.100.000	30.723.000
089	> 29.590.000 s.d. 30.345.000	30.345.000
090	> 28.855.000 s.d. 29.590.000	29.223.000
091	> 28.120.000 s.d. 28.855.000	28.855.000
092	> 27.405.000 s.d. 28.120.000	27.763.000
093	> 26.690.000 s.d. 27.405.000	27.405.000
094	> 25.995.000 s.d. 26.690.000	26.343.000
095	> 25.300.000 s.d. 25.995.000	25.995.000
096	> 24.625.000 s.d. 25.300.000	24.963.000
097	> 23.950.000 s.d. 24.625.000	24.625.000
098	> 23.295.000 s.d. 23.950.000	23.623.000
099	> 22.640.000 s.d. 23.295.000	23.295.000
100	> 22.005.000 s.d. 22.640.000	22.323.000
101	> 21.370.000 s.d. 22.005.000	22.005.000
102	> 20.755.000 s.d. 21.370.000	21.063.000
103	> 20.140.000 s.d. 20.755.000	20.755.000
104	> 19.545.000 s.d. 20.140.000	19.843.000
105	> 18.950.000 s.d. 19.545.000	19.545.000
106	> 18.375.000 s.d. 18.950.000	18.663.000
107	> 17.800.000 s.d. 18.375.000	18.375.000
108	> 17.245.000 s.d. 17.800.000	17.523.000
109	> 16.690.000 s.d. 17.245.000	17.245.000
110	> 16.155.000 s.d. 16.690.000	16.423.000
111	> 15.620.000 s.d. 16.155.000	16.155.000
112	> 15.105.000 s.d. 15.620.000	15.363.000
113	> 14.590.000 s.d. 15.105.000	15.105.000
114	> 14.095.000 s.d. 14.590.000	14.343.000



KELAS	PENGELOMPOKAN NILAI JUAL BUMI (RP/M2)	NILAI JUAL OBJEK PAJAK (RP/M2)
115	> 13.600.000 s.d. 14.095.000	14.095.000
116	> 13.125.000 s.d. 13.600.000	13.363.000
117	> 12.650.000 s.d. 13.125.000	13.125.000
118	> 12.195.000 s.d. 12.650.000	12.423.000
119	> 11.740.000 s.d. 12.195.000	12.195.000
120	> 11.305.000 s.d. 11.740.000	11.523.000
121	> 10.870.000 s.d. 11.305.000	11.305.000
122	> 10.455.000 s.d. 10.870.000	10.663.000
123	> 10.040.000 s.d. 10.455.000	10.455.000
124	> 9.645.000 s.d. 10.040.000	9.843.000
125	> 9.250.000 s.d. 9.645.000	9.645.000
126	> 8.875.000 s.d. 9.250.000	9.063.000
127	> 8.500.000 s.d. 8.875.000	8.875.000
128	> 8.145.000 s.d. 8.500.000	8.323.000
129	> 7.790.000 s.d. 8.145.000	8.145.000
130	> 7.455.000 s.d. 7.790.000	7.623.000
131	> 7.120.000 s.d. 7.455.000	7.455.000
132	> 6.805.000 s.d. 7.120.000	6.963.000
133	> 6.490.000 s.d. 6.805.000	6.805.000
134	> 6.195.000 s.d. 6.490.000	6.343.000
135	> 5.900.000 s.d. 6.195.000	6.195.000
136	> 5.625.000 s.d. 5.900.000	5.763.000
137	> 5.350.000 s.d. 5.625.000	5.625.000
138	> 5.095.000 s.d. 5.350.000	5.223.000
139	> 4.840.000 s.d. 5.095.000	5.095.000
140	> 4.605.000 s.d. 4.840.000	4.723.000
141	> 4.370.000 s.d. 4.605.000	4.605.000
142	> 4.155.000 s.d. 4.370.000	4.263.000
143	> 3.940.000 s.d. 4.155.000	4.155.000
144	> 3.745.000 s.d. 3.940.000	3.843.000

KELAS	PENGELOMPOKAN NILAI JUAL BUMI (RP/M2)	NILAI JUAL OBJEK PAJAK (RP/M2)
145	> 3.550.000 s.d. 3.745.000	3.745.000
146	> 3.200.000 s.d. 3.550.000	3.375.000
147	> 3.000.000 s.d. 3.200.000	3.100.000
148	> 2.850.000 s.d. 3.000.000	2.925.000
149	> 2.708.000 s.d. 2.850.000	2.779.000
150	> 2.573.000 s.d. 2.708.000	2.640.000
151	> 2.444.000 s.d. 2.573.000	2.508.000
152	> 2.261.000 s.d. 2.444.000	2.352.000
153	> 2.091.000 s.d. 2.261.000	2.176.000
154	> 1.934.000 s.d. 2.091.000	2.013.000
155	> 1.789.000 s.d. 1.934.000	1.862.000
156	> 1.655.000 s.d. 1.789.000	1.722.000
157	> 1.490.000 s.d. 1.655.000	1.573.000
158	> 1.341.000 s.d. 1.490.000	1.416.000
159	> 1.207.000 s.d. 1.341.000	1.274.000
160	> 1.086.000 s.d. 1.207.000	1.147.000
161	> 977.000 s.d. 1.086.000	1.032.000
162	> 855.000 s.d. 977.000	916.000
163	> 748.000 s.d. 855.000	802.000
164	> 655.000 s.d. 748.000	702.000
165	> 573.000 s.d. 655.000	614.000
166	> 501.000 s.d. 573.000	537.000
167	> 426.000 s.d. 501.000	464.000
168	> 362.000 s.d. 426.000	394.000
169	> 308.000 s.d. 362.000	335.000
170	> 262.000 s.d. 308.000	285.000
171	> 223.000 s.d. 262.000	243.000
172	> 178.000 s.d. 223.000	200.000
173	> 142.000 s.d. 178.000	160.000
174	> 114.000 s.d. 142.000	128.000

KELAS	PENGELOMPOKAN NILAI JUAL BUMI (RP/M2)	NILAI JUAL OBJEK PAJAK (RP/M2)
175	> 91.000 s.d. 114.000	103.000
176	> 73.000 s.d. 91.000	82.000
177	> 55.000 s.d. 73.000	64.000
178	> 41.000 s.d. 55.000	48.000
179	> 31.000 s.d. 41.000	36.000
180	> 23.000 s.d. 31.000	27.000
181	> 17.000 s.d. 23.000	20.000
182	> 12.000 s.d. 17.000	14.000
183	> 8.400 s.d. 12.000	10.000
184	> 5.900 s.d. 8.400	7.150
185	> 4.100 s.d. 5.900	5.000
186	> 2.900 s.d. 4.100	3.500
187	> 2.000 s.d. 2.900	2.450
188	> 1.400 s.d. 2.000	1.700
189	> 1.050 s.d. 1.400	1.200
190	≤ 1.050	910

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA

Lampiran II : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 263 TAHUN 2014  
Tanggal 30 Desember 2014

KLASIFIKASI NILAI JUAL BUMI DAN PENETAPAN  
NILAI JUAL OBJEK PAJAK BANGUNAN

KELAS	PENGELOMPOKAN NILAI JUAL BANGUNAN (RP/M2)	NILAI JUAL OBJEK PAJAK (RP/M2)
001	> 48.300.000 s.d. 50.450.000	49.375.000
002	> 46.200.000 s.d. 48.300.000	47.250.000
003	> 44.150.000 s.d. 46.200.000	45.175.000
004	> 42.150.000 s.d. 44.150.000	43.150.000
005	> 40.200.000 s.d. 42.150.000	41.175.000
006	> 38.300.000 s.d. 40.200.000	39.250.000
007	> 36.450.000 s.d. 38.300.000	37.375.000
008	> 34.650.000 s.d. 36.450.000	35.550.000
009	> 32.900.000 s.d. 34.650.000	33.775.000
010	> 31.200.000 s.d. 32.900.000	32.050.000
011	> 29.550.000 s.d. 31.200.000	30.375.000
012	> 27.950.000 s.d. 29.550.000	28.750.000
013	> 26.400.000 s.d. 27.950.000	27.175.000
014	> 24.900.000 s.d. 26.400.000	25.650.000
015	> 23.450.000 s.d. 24.900.000	24.175.000
016	> 22.050.000 s.d. 23.450.000	22.750.000
017	> 20.700.000 s.d. 22.050.000	21.375.000
018	> 19.400.000 s.d. 20.700.000	20.050.000
019	> 18.150.000 s.d. 19.400.000	18.775.000
020	> 16.950.000 s.d. 18.150.000	17.550.000
021	> 15.800.000 s.d. 16.950.000	16.375.000
022	> 14.700.000 s.d. 15.800.000	15.250.000
023	> 13.600.000 s.d. 14.700.000	14.150.000
024	> 12.550.000 s.d. 13.600.000	13.075.000



KELAS	PENGELOMPOKAN NILAI JUAL BANGUNAN (RP/M2)	NILAI JUAL OBJEK PAJAK (RP/M2)
025	> 11.550.000 s.d. 12.550.000	12.050.000
026	> 10.600.000 s.d. 11.550.000	11.075.000
027	> 9.700.000 s.d. 10.600.000	10.150.000
028	> 8.850.000 s.d. 9.700.000	9.275.000
029	> 8.050.000 s.d. 8.850.000	8.450.000
030	> 7.300.000 s.d. 8.050.000	7.675.000
031	> 6.600.000 s.d. 7.300.000	6.950.000
032	> 5.850.000 s.d. 6.600.000	6.225.000
033	> 5.150.000 s.d. 5.850.000	5.500.000
034	> 4.500.000 s.d. 5.150.000	4.825.000
035	> 3.900.000 s.d. 4.500.000	4.200.000
036	> 3.350.000 s.d. 3.900.000	3.625.000
037	> 2.850.000 s.d. 3.350.000	3.100.000
038	> 2.400.000 s.d. 2.850.000	2.625.000
039	> 2.000.000 s.d. 2.400.000	2.200.000
040	> 1.666.000 s.d. 2.000.000	1.833.000
041	> 1.366.000 s.d. 1.666.000	1.516.000
042	> 1.034.000 s.d. 1.366.000	1.200.000
043	> 902.000 s.d. 1.034.000	968.000
044	> 744.000 s.d. 902.000	823.000
045	> 656.000 s.d. 744.000	700.000
046	> 534.000 s.d. 656.000	595.000
047	> 476.000 s.d. 534.000	505.000
048	> 382.000 s.d. 476.000	429.000
049	> 348.000 s.d. 382.000	365.000
050	> 272.000 s.d. 348.000	310.000
051	> 256.000 s.d. 272.000	264.000
052	> 194.000 s.d. 256.000	225.000
053	> 188.000 s.d. 194.000	191.000
054	> 136.000 s.d. 188.000	162.000

KELAS	PENGELOMPOKAN NILAI JUAL BANGUNAN (RP/M2)	NILAI JUAL OBJEK PAJAK (RP/M2)
055	> 128.000 s.d. 136.000	132.000
056	> 104.000 s.d. 128.000	116.000
057	> 92.000 s.d. 104.000	98.000
058	> 74.000 s.d. 92.000	83.000
059	> 60.000 s.d. 74.000	71.000
060	≤ 60.000	50.000

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA